

## Perubahan AD BMPPVI

Ketentuan Existing	Usulan Perubahan Ketentuan
<p><b>I. <u>Ketentuan Pasal 2</u></b></p> <p style="text-align: center;"><b>BAB II</b> <b>NAMA, TEMPAT KEDUDUKAN DAN JANGKA WAKTU</b> <b>Pasal 2</b> <b>NAMA</b></p> <p>Perkumpulan ini bernama Perkumpulan Badan Mediasi Pembiayaan, Pegadaian dan Ventura Indonesia, selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini disingkat “BMPPVI”.</p>	<p style="text-align: center;"><b>BAB II</b> <b>NAMA, TEMPAT KEDUDUKAN DAN JANGKA WAKTU</b> <b>Pasal 2</b> <b>NAMA</b></p> <p>Perkumpulan ini bernama Perkumpulan Badan Mediasi Pembiayaan, Pegadaian dan Ventura Indonesia, selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini disingkat “BMPPVI”.</p>
<p><b>II. <u>Ketentuan Pasal 26</u></b></p> <p style="text-align: center;"><b>Pasal 26</b> <b>KUORUM, HAK SUARA DAN KEPUTUSAN</b> <b>RAPAT UMUM ANGGOTA PERKUMPULAN</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Kecuali ditentukan lain dalam Anggaran Dasar ini, Rapat Umum Anggota BMPPVI adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang sah, jika rapat tersebut dihadiri dan/atau diwakili oleh Anggota yang mewakili oleh lebih dari ½ (satu per dua) jumlah Anggota Perkumpulan.</li> <li>Jika kourum dimaksud dalam ayat (1) tidak terpenuhi, maka 2 (dua) jam kemudian terhitung sejak jam yang disebutkan dalam panggilan untuk Rapat Umum Anggota Perkumpulan yang bersangkutan, Rapat Umum Anggota Perkumpulan dapat dilangsungkan dengan sah oleh mereka yang hadir asal Anggota yang hadir dan/atau diwakili berjumlah lebih dari ½ (satu per dua) dari jumlah Anggota</li> </ol>	<p style="text-align: center;"><b>Pasal 26</b> <b>KUORUM, HAK SUARA DAN KEPUTUSAN</b> <b>RAPAT UMUM ANGGOTA PERKUMPULAN</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Kecuali ditentukan lain dalam Anggaran Dasar ini, Rapat Umum Anggota Perkumpulan adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang sah, jika rapat tersebut dihadiri dan/atau diwakili oleh Anggota yang mewakili oleh lebih dari ½ (satu per dua) jumlah Anggota Perkumpulan.</li> <li>Jika Kourum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak tercapai, maka Rapat Umum Anggota Perkumpulan ditunda dalam waktu 1 (satu) jam kemudian Rapat Rapat Umum Anggota Perkumpulan dilanjutkan dan dianggap sah tanpa memperhitungkan jumlah Anggota Perkumpulan yang hadir.</li> </ol>

Perkumpulan.

- |   |   |
|---|---|
| <ol style="list-style-type: none"><li>3. Dalam hal kourum dimaksud dalam Ayat (2) tidak juga tercapai, maka diselenggarakan Rapat Umum Anggota Perkumpulan kedua dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah Rapat Umum Anggota Perkumpulan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) dan Ayat (2), dapat diadakan lagi Rapat Umum Anggota Perkumpulan dengan cara yang sama dengan Rapat Umum Anggota Perkumpulan sebagaimana dimaksud Ayat (1) dan Ayat (2).</li><li>4. Rapat Umum Anggota Perkumpulan kedua sebagaimana dimaksud dalam Ayat (3) tersebut di atas adalah sah tanpa memperhitungkan jumlah Anggota yang hadir.</li><li>5. Setiap Anggota yang berhalangan hadir berhak memberi kuasa kepada Anggota lainnya, dengan surat kuasa yang sah dengan ketentuan kuasa tersebut sebanyak-banyaknya dari 5 (lima) Anggota.</li><li>6. Dalam Rapat Umum Anggota Perkumpulan, setiap Anggota Perkumpulan memiliki 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap Anggota Perkumpulan lain yang diwakilinya.</li><li>7. Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah dan mufakat. Jika musyawarah</li></ol> | <ol style="list-style-type: none"><li>3. Setiap Anggota yang berhalangan hadir berhak memberi kuasa kepada Anggota lainnya, dengan surat kuasa yang sah dengan ketentuan kuasa tersebut sebanyak-banyaknya dari 5 (lima) Anggota.</li><li>4. Dalam Rapat Umum Anggota Perkumpulan, setiap Anggota Perkumpulan memiliki 1 (satu) suara dan tambahan suara sesuai dengan yang diwakilinya.</li><li>5. Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah dan mufakat. Jika musyawarah dan mufakat tidak dapat menghasilkan keputusan, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari <math>\frac{1}{2}</math> (satu per dua) jumlah Anggota Perkumpulan yang hadir atau diwakili dengan sah dalam Rapat Umum Anggota Perkumpulan, kecuali jika dalam Anggaran Dasar ini ditentukan lain.</li><li>6. Keputusan dapat pula diambil di luar Rapat Umum Anggota sepanjang seluruh Anggota Perkumpulan telah disampaikan cara dan materi yang diputuskan terlebih dahulu dan menyetujuinya dengan cara memberikan persetujuan tertulis dan ikut menandatangani keputusan sirkuler yang bersangkutan. Keputusan. Sirkuler demikian berkekuatan hukum yang sama dengan keputusan yang diambil dalam Rapat Umum Anggota Perkumpulan sesuai dengan Anggaran Dasar ini.</li></ol> |
|---|---|

dan mufakat tidak dapat menghasilkan keputusan, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) jumlah Anggota Perkumpulan yang hadir atau diwakili dengan sah dalam Rapat Umum Anggota Perkumpulan, kecuali jika dalam Anggaran Dasar ini ditentukan lain.

8. Anggota BMPPI dapat juga mengambil keputusan yang sah dan mengikat tanpa mengadakan Rapat Umum Anggota Perkumpulan dengan cara membuat keputusan sirkuler, asal saja usul keputusan telah disampaikan secara tertulis kepada semua Anggota Perkumpulan dan semua Anggota Perkumpulan telah menyetujui keputusan yang diusulkan itu dengan cara memberikan persetujuan tertulis dan ikut menandatangani keputusan sirkuler yang bersangkutan. Keputusan Sirkuler demikian berkekuatan hukum yang sama dengan keputusan yang diambil dalam Rapat Umum Anggota Perkumpulan sesuai dengan Anggaran Dasar ini.

### **III. Ketentuan Pasal 29**

#### **BAB XI PERUBAHAN ANGGARAN DASAR Pasal 29**

1. Perubahan Anggaran Dasar hanya sah jika diputuskan oleh Rapat Umum Anggota Perkumpulan yang khusus diadakan untuk itu pada Rapat tersebut hadir dan/atau diwakili sekurang-kurangnya  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) jumlah Anggota Perkumpulan.
2. Jika kuorum dimaksud dalam Ayat (1) tidak terpenuhi, maka 2 (dua) jam kemudian terhitung sejak jam yang disebutkan dalam panggilan untuk Rapat Umum Anggota Perkumpulan yang bersangkutan, Rapat Umum Anggota Perkumpulandapat dilangsungkan dengan sah oleh mereka yang hadir asal Anggota yang hadir dan/atau diwakili berjumlah lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) dari jumlah Anggota Perkumpulan.

#### **BAB XI PERUBAHAN ANGGARAN DASAR Pasal 29**

1. Perubahan Anggaran Dasar hanya sah jika ditetapkan dan diputuskan oleh Rapat Umum Anggota Perkumpulan;
2. Acara mengenai perubahan anggaran dasar wajib dicantumkan dengan jelas dalam panggilan Rapat Umum Anggota Perkumpulan;

3. Dalam hal kuorum dimaksud dalam Ayat (2) tidak juga tercapai, maka diselenggarakan Rapat Umum Anggota Perkumpulan kedua dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah Rapat Umum Anggota BMPPI sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) dan Ayat (2), dapat diadakan lagi Rapat Umum Anggota Perkumpulan dengan acara yang sama dengan Rapat Umum Anggota Perkumpulan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) dan Ayat (2).
4. Rapat Umum Anggota Perkumpulan kedua sebagaimana dimaksud dalam Ayat (3) tersebut diatas adalah sah tanpa memperhitungkan jumlah Anggota yang hadir.
5. Keputusan diambil berdasarkan musyawarah dan mufakat. Jika musyawarah dan mufakat tidak dapat menghasilkan keputusan, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) jumlah Anggota Perkumpulan yang hadir atau diwakili dengan sah dalam Rapat Umum Anggota Perkumpulan.

3. Rapat Umum Anggota Perkumpulan untuk mengubah Anggaran Dasar dapat dilangsungkan jika dalam Rapat dihadiri paling sedikit 2/3 (dua per tiga) jumlah seluruh anggota Perkumpulan.
4. Jika Kourum sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) tidak tercapai, maka Rapat Umum Anggota Perkumpulan ditunda dalam waktu 1 (satu) jam kemudian Rapat Umum Anggota Perkumpulan dilanjutkan dan dianggap sah tanpa memperhitungkan jumlah Anggota Perkumpulan yang hadir.
5. Keputusan diambil berdasarkan musyawarah dan mufakat. Jika musyawarah dan mufakat tidak dapat menghasilkan keputusan, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) jumlah Anggota Perkumpulan yang hadir atau diwakili dengan sah dalam Rapat Umum Anggota Perkumpulan.

#### **IV. Ketentuan Pasal 29**

##### **BAB XIII ANGGARAN RUMAH TANGGA Pasal 29**

1. Hal – hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

##### **BAB XIII ANGGARAN RUMAH TANGGA Pasal 31**

1. Hal – hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Anggaran Rumah Tangga disusun oleh Pengurus untuk selanjutnya diajukan kepada Rapat Umum Anggota Perkumpulan untuk dimintakan persetujuan.</li> <li>3. Anggaran Rumah Tangga tidak boleh bertentangan dengan Anggaran Dasar.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Anggaran Rumah Tangga disusun oleh Pengurus untuk selanjutnya diajukan kepada Rapat Umum Anggota Perkumpulan untuk dimintakan persetujuan.</li> <li>3. Anggaran Rumah Tangga tidak boleh bertentangan dengan Anggaran Dasar.</li> </ol>
<p><b>V. <u>Ketentuan Pasal 30</u></b></p> <p style="text-align: center;"><b>PEMBUBARAN Pasal 30</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembubaran Perkumpulan hanya sah jika dalam Rapat Umum Anggota Perkumpulan yang khusus diadakan untuk itu, dihadiri sekurang-kurangnya oleh <math>\frac{3}{4}</math> (tiga per empat) jumlah anggota Perkumpulan dan keputusan disetujui sekurang-kurangnya <math>\frac{3}{4}</math> (tiga per empat) dari jumlah Anggota Perkumpulan yang hadir atau diwakili dengan sah dalam Rapat Umum Anggota Perkumpulan.</li> <li>2. Jika dalam Rapat Umum Anggota Perkumpulan yang pertama sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) tersebut tidak mencapai kuorum, maka dapat diadakan Rapat Umum Anggota Perkumpulan kedua dengan acara yang sama seperti untuk Rapat yang Pertama.</li> <li>3. Rapat Umum Anggota Perkumpulan kedua dimaksud di atas adalah sah jika pada Rapat tersebut setidaknya hadir dan/atau diwakili lebih dari <math>\frac{2}{3}</math> (dua per tiga) jumlah Anggota Perkumpulan dan keputusan pembubaran itu disetujui oleh <math>\frac{2}{3}</math> (dua per tiga) jumlah Anggota yang hadir atau diwakili dengan sah dalam Rapat Umum Anggota Perkumpulan yang bersangkutan.</li> <li>4. Pembubaran Perkumpulan harus diumumkan dalam Tambahan Berita Negara</li> </ol>	<p style="text-align: center;"><b>PENGGABUNGAN, PELEBURAN, DAN PEMBUBARAN Pasal 30</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penggabungan, Peleburan, dan Pembubaran Perkumpulan hanya sah jika ditetapkan dan diputuskan oleh Rapat Umum Anggota Perkumpulan.</li> <li>2. Acara mengenai perubahan anggaran dasar wajib dicantumkan dengan jelas dalam panggilan Rapat Umum Anggota Perkumpulan.</li> <li>3. Rapat Umum Anggota Perkumpulan untuk Penggabungan, Peleburan, dan Pembubaran Perkumpulan dapat dilaksanakan jika dalam Rapat dihadiri paling sedikit <math>\frac{3}{4}</math> (tiga per empat) jumlah seluruh anggota Perkumpulan.</li> <li>4. Jika Kourum sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) tidak tercapai,</li> </ol>

Republik Indonesia.

maka diserahkan untuk diputuskan oleh para Pendiri Perkumpulan.

5. Keputusan diambil berdasarkan musyawarah dan mufakat. Jika musyawarah dan mufakat tidak dapat menghasilkan keputusan, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju sekurang-kurangnya  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) jumlah Anggota Perkumpulan yang hadir atau diwakili dengan sah dalam Rapat Umum Anggota Perkumpulan.